

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026**  
**Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital**  
**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

**A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026**

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital memiliki 6 (enam) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Triwulan III Tahun 2026**

| No         | Indikator Kinerja Utama                                                                                                           | Satuan     | Target Tahun 2026      | Target Triwulan III 2026  | Realisasi Triwulan III | Capaian Kinerja (%) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>Sasaran Program 1. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</b>      |            |                        |                           |                        |                     |
| 1.1        | Indikator 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB                                                                             | Persentase | 9-10%                  | 9-10% <sup>c)</sup>       | 9-10% <sup>a)</sup>    | 100%                |
| 1.2        | Indikator 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB                                                                      | Persentase | 21,9%                  | 21,9% <sup>c)</sup>       | 23,13% <sup>a)</sup>   | 105,62%             |
| 1.3        | Indikator 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB                                                                | Persentase | 13,07%                 | 13,07%                    | 13,02% <sup>a)</sup>   | 99,62%              |
| 1.4        | Persentase Penyelesaian Inisiasi Glg Economy                                                                                      | Persentase | 60%                    | 60% <sup>c)</sup>         | 21,43%                 | 35,72%              |
| 1.5        | Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri                                                                               | Persentase | 100%                   | 100% <sup>c)</sup>        | 96,73%                 | 96,73%              |
| <b>II</b>  | <b>Sasaran Program 2. Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas</b>                                                |            |                        |                           |                        |                     |
| 2.1        | Indikator 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB                                                                            | Persentase | 8,09% <sup>b)</sup>    | 8,09% <sup>b)</sup>       | 10,45% <sup>a)</sup>   | 77,42%              |
| 2.2        | Indikator 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan                                                                             | Hari       | 1,6 hari <sup>b)</sup> | 1,6 hari <sup>b) c)</sup> | 1,42 hari              | 110%                |
| <b>III</b> | <b>Sasaran Program 3. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan</b>                                                   |            |                        |                           |                        |                     |
| 3.1        | Indikator 3.1 Indeks Literasi Keuangan                                                                                            | Indeks     | 60,27                  | 60,27 <sup>c)</sup>       | 69,57 <sup>d)</sup>    | 115,43%             |
| <b>IV</b>  | <b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas</b>                           |            |                        |                           |                        |                     |
| 4.1        | Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital | Indeks     | 3 dari 4 (Baik)        | 1 dari 4                  | 1 <sup>d)</sup>        | 100%                |

|            |                                                                                                                                                    |            |                 |                        |                    |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------|
| <b>V</b>   | <b>Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas</b> |            |                 |                        |                    |         |
| <b>5.1</b> | Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital                | Indeks     | 3 dari 4 (Baik) | 3 dari 4 <sup>e)</sup> | 3,43 <sup>a)</sup> | 110%    |
| <b>VI</b>  | <b>Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas</b>                                    |            |                 |                        |                    |         |
| <b>6.1</b> | Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital                                 | Persentase | 92%             | 60%                    | 63,64%             | 106,07% |

Keterangan:

a) Nilai merupakan proyeksi capaian

b) Target merupakan nilai maksimal

c) Angka target tahunan

d) angka realisasi tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK Tahun 2026)

e) Angka merupakan target semester II tahun 2026

f) Nilai belum merupakan indeks akhir

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Sasaran Program: Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional ditunjukkan oleh pencapaian lima indikator kinerja yaitu:

- a.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
- a.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB
- a.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB
- a.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy
- a.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB

#### Latar Belakang

Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku

usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.

Pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Ekonomi Digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)} = \frac{\text{PDB Sektor Ekonomi Digital}}{\text{Total PDB}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB Tahun 2026 adalah sebesar 9-10%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 1.1 sampai dengan Triwulan III 2026 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                          | Satuan     | Target TW III | Realisasi TW III | % Kinerja        |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| IKU 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB | Persentase | 9-10%*        | 9-10%**          | 100% (Memuaskan) |

Keterangan:

\*) Merupakan target tahunan

\*\*) Angka realisasi merupakan proyeksi

Sampai dengan Triwulan III tahun 2026, realisasi masih berupa proyeksi karena metode perhitungan ekonomi digital masih dalam proses penyusunan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Metodologi yang disepakati untuk digunakan yaitu dengan menggunakan kerangka OECD pendekatan berlapis (*layer approach*). Saat ini sedang dilakukan pemetaan tiap layer, termasuk pemetaan KBLI 2025 dan SNA (*System of National Accounts*) 2025. Diperkirakan penyusunan metodologi dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026.

Namun, target tahun 2026 optimis dapat tercapai melihat perkembangan kinerja sistem pembayaran digital di Indonesia yang semakin kuat. Berdasar data Bank Indonesia pada Agustus 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi atau meningkat sebesar 40,36% (yoy), seiring dengan semakin luasnya penerimaan dan penggunaan instrumen pembayaran digital di masyarakat. Transaksi melalui layanan mobile banking dan internet banking masing-masing tumbuh sebesar 15,12% (yoy) dan 47,08% (yoy). Di samping itu, transaksi menggunakan QRIS terus mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni sebesar 67,22% (yoy), yang didukung oleh bertambahnya jumlah pengguna dan *merchant* yang memanfaatkan sistem pembayaran tersebut.

Dari sisi infrastruktur sistem pembayaran, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 549 juta transaksi atau meningkat 37,72% (yoy), dengan nilai transaksi mencapai Rp1.346 triliun pada Agustus 2026. Sementara itu, transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 0,86 juta transaksi, dengan nominal transaksi sebesar Rp16.545 triliun. Adapun dari aspek pengelolaan uang Rupiah, posisi Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada April 2026 mencapai Rp1.332 triliun atau tumbuh 12,88% (yoy), yang mencerminkan tetap tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai di tengah pesatnya perkembangan transaksi digital.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2026-2030 yang mencakup penguatan regulasi *e-commerce* termasuk Peraturan Pemerintah (PP) terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemberdayaan platform *e-commerce* untuk UMKM, dan lainnya maupun sumber lain yang sejalan dengan RPJMN.

Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian aktif melakukan koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya berupa koordinasi informal terkait metodologi yang digunakan untuk pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB. Adapun diskusi dilakukan dengan melibatkan Prof. Babacan, dan instansi lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB</b> |                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan I</b>                                   |                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>No</b>                                           | <b>Rencana Aksi</b>                                                           | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                   | Koordinasi pengumpulan data dan informasi isu/permasalahan terkait e-commerce | Terlaksana    | Koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi isu/permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce dengan melakukan diskusi bersama Prof. Babacan dari Australia. |
| 2                                                   | Koordinasi pembahasan Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB      | Terlaksana    | Koordinasi pembahasan pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB telah dilaksanakan pada 27 Januari 2026                                                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                     |            | sesuai undangan Nomor PED.04.06/18/D.III.M.EKO N.5/01/2026; 6 April 2026<br>sesuai undangan Nomor PED.04.04/38/D.III.M.EKO N.5/03/2026; 16 April 2026<br>sesuai undangan Nomor PED.04.04/39/D.III.M.EKO N.5/04/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan II</b> |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No                 | Rencana Aksi                                                                                                        | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                  | Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait e-commerce                                                         | Terlaksana | Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait e-commerce telah dilaksanakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Triwulan II</b> |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No                 | Rencana Aksi                                                                                                        | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                  | Monitoring dan evaluasi isu/permasalahan terkait e-commerce                                                         | Terlaksana | Monitoring dan evaluasi isu/permasalahan terkait e-commerce dilaksanakan melalui Koordinasi Penyelesaian isu/permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UKM/IKM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                  | Monitoring dan evaluasi jumlah volume transaksi e-commerce sebagai proyeksi pengukuran ekonomi digital terhadap PDB | Terlaksana | Monitoring dan evaluasi jumlah volume transaksi e-commerce sebagai proyeksi pengukuran ekonomi digital terhadap PDB dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Penyelarasan Klasifikasi Statistik dalam Penyempurnaan Metodologi Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB sesuai surat Nomor PED.04.06/75/D.III.M.EKO N.5/07/2026 tanggal 14 Juli 2026, serta Rapat Koordinasi Teknis Penyempurnaan Metodologi Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB sesuai surat Nomor PED.04.06/83/D.III.M.EKO N.5/07/2026 tanggal 28 Juli 2026. |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi rutin bersama kementerian/lembaga terkait:

1. Membuat *timeline* target dan rencana kegiatan pembahasan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
2. Melakukan koordinasi insentif dengan K/L terkait terhadap capaian volume transaksi e-commerce.
3. Melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap daftar periksa

(*checklist*) rencana yang telah disusun.

4. Menjadi co-host acara FEKDI x IFSE 2026 tanggal 24-26 September 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu:

1. Perumusan formulasi metodologi membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena terbatasnya anggaran dan kapasitas di kementerian/lembaga terkait.
2. Peningkatan nilai transaksi dan luasnya digitalisasi pembayaran harus dibarengi dengan peningkatan nilai tambah domestik dan produktivitas.
3. Pertumbuhan AI dan digitalisasi harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur digital dan energi. Kesiapan infrastruktur yang belum seragam berpotensi menahan realisasi investasi dan ekspansi industri digital.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, serta lembaga *think tank* atau pihak lainnya untuk *benchmarking* dan *capacity building* dalam rangka perumusan formulasi metodologi ekonomi digital.
2. Pelaksanaan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengembangan infrastruktur digital, pusat data, energi, dan talenta digital.
3. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk mendorong transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, ekspor jasa digital, dan penciptaan nilai tambah domestik.

## 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB

### Latar Belakang

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan perdagangan nasional melalui proses sinkronisasi koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu prioritas agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- A. Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif;
- B. Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;
- C. Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategi yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- D. Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Dan untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.

Pengukuran kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB bertujuan untuk mengukur kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebagai indikator keberhasilan penguatan perdagangan Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB (\%)} = \frac{\text{Nilai Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB Tahun 2026 adalah sebesar 21,9%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 1.2 sampai dengan Triwulan III 2026 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                 | Satuan     | Target TW III | Realisasi TW III | % Kinerja |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| IKU 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB | Persentase | 21,9%         | 23,13%*          | 105,62%   |

*Keterangan: \*) angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada triwulan II tahun 2026*

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Triwulan III Tahun 2026 belum diketahui dikarenakan jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November 2026. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB pada Triwulan II Tahun 2026 yang telah dirilis pada bulan Agustus 2026.

Neraca perdagangan periode Juli 2026 mencatat surplus sebesar 0,12 miliar dolar AS, setelah pada bulan sebelumnya mencatat defisit 0,45 miliar dolar AS. Adapun realisasi Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 23,13% dengan nilai ekspor barang dan jasa Rp1.515.470,89 miliar dan nilai pendapatan domestik bruto nasional sebesar Rp6.552.068 miliar. Dari proyeksi tersebut, angka Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa pada Triwulan III diperkirakan minimal sebesar 23,13%, sehingga kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 105,62% yang didapat dari persentase realisasi triwulan I dibanding dengan target Triwulan III.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan perlu terus didorong dengan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi. Perkembangan terkini menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang besarnya berbagai stimulus fiskal Pemerintah serta mulai menguatnya keyakinan dan ekspektasi penghasilan konsumen. Investasi juga tetap tumbuh baik terutama ditopang oleh investasi Pemerintah di tengah peran investasi swasta yang perlu terus ditingkatkan. Dari eksternal, kinerja ekspor nonmigas meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan beberapa negara, meskipun berbagai upaya perlu terus diperkuat guna mengoptimalkan dampak kenaikan harga komoditas ekspor.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwulan I                                          |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No                                                  | Rencana Aksi                                                                                                                | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                   | Evaluasi implementasi kebijakan peningkatan ekspor tahun 2025                                                               | Terlaksana | Evaluasi implementasi kebijakan peningkatan ekspor dilaksanakan melalui kegiatan rapat:<br>1. 21 Januari 2026 (Kemenko Perekonomian)<br>2. 11 Februari 2026 (Kemenko Perekonomian)                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                   | Koordinasi kebijakan <i>high level meeting</i> peningkatan ekspor untuk komoditas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan | Terlaksana | Koordinasi kebijakan <i>high level meeting</i> peningkatan ekspor dilakukan melalui rapat:<br>1. 7 Januari 2026 (Zoom)<br>2. 23 Januari 2026 (Zoom)<br>3. 29 Januari 2026 (Zoom)<br>4. 3 Februari 2026 (Zoom)<br>5. 5 Februari 2026 (Kemenko Perekonomian)<br>6. 5 Maret 2026 (Bogor)<br>7. 10 Maret 2026 (Kemenko Perekonomian)<br>8. 12 Maret 2026 (Kemenko Perekonomian) |
| Triwulan II                                         |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No                                                  | Rencana Aksi                                                                                                                | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                   | Koordinasi evaluasi implementasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024                                                               | Terlaksana | Koordinasi evaluasi implementasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dilaksanakan melalui rapat:<br>1. 30 April 2026 (Kemendag)<br>2. 26 Mei 2026 (Kemenkum)<br>3. 9 Juli 2026 (Kemendag)                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                   | Koordinasi evaluasi implementasi Permendag                                                                                  | Terlaksana | Koordinasi evaluasi implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     | Nomor 23 Tahun 2023                                                                                                                                |            | dilaksanakan melalui rapat:<br>1. 28 April 2026 (Kemendag)<br>2. 25 Mei 2026 (Kemenkum)<br>3. 10 Juni 2026 (Kemendag)                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan III</b> |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                            |
| No                  | Rencana Aksi                                                                                                                                       | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                 |
| 1                   | Koordinasi identifikasi isu strategis dalam kerangka fasilitasi perdagangan lintas K/L dalam lingkup Komisi Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) | Terlaksana | Koordinasi identifikasi isu strategis dalam kerangka fasilitasi perdagangan lintas K/L dalam lingkup KNFP dilaksanakan melalui Sosialisasi dan Monev tanggal 2 Juli dan 21 September 2026. |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain juga telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan *Tripartite High-Level Meeting* yang dilaksanakan bersama dengan pimpinan Kementerian Perdagangan RRT (*Ministry of Commerce/MOFCOM*) dan Pemerintah Provinsi Fujian, serta kegiatan *business matching* dan MoU antara pelaku usaha Indonesia dan Tiongkok.
2. Kegiatan Training Seminar on the China-Indonesia "Two Countries, Twin Parks (TCTP)" Cooperation yang didanai oleh Pemerintah RRT, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta diikuti oleh peserta dari Kementerian Keuangan, Badan Karantina Indonesia, Sekretariat Dewan Nasional KEK, pengelola kawasan yang terlibat TCTP di Indonesia, dan asosiasi usaha.
3. Rapat Kerja KNFP dan Sosialisasi Kepmenko No.613 Tahun 2025 sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/13/D.III.M.EKON.3/04/2026.
4. Rapat Koordinasi Progress Kesiapan KEK Tanjung Lesung dalam Kerja Sama TCTP sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/14/D.III.M.EKON.3/04/2026.
5. Rapat *Preparation for the TCTP Seminar, Business Matching, and Memorandum of Understanding (MoU) Signing* sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/03/D.III.M.EKON.3/01/2026 dan PED.02.01/15/D.III.M.EKON.3/04/2026 dan PED.02.01/16/D.III.M.EKON.3/04/2026.
6. Rapat Koordinasi Teknis Kurasi proyek kerja sama dalam rangka TCTP dan Identifikasi isu strategis untuk dibahas dalam *High Level Meeting* sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/17/D.III.M.EKON.3/04/2026.
7. Rapat Tim Dashboard dan Penguatan Analisis Perdagangan Internasional Menggunakan Metode GTAP sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/18/D.III.M.EKON.3/04/2026. Penyalpaaian Nota

Dinas Rapat Tim PKN atas Rekomendasi Hasil Penyelidikan KKPI Terhadap Pengenaan Perpanjangan BMTP atas Impor Produk Benang Stapel dan BMTP atas Impor Produk Tirai sesuai nota dinas nomor PED.02.03/41/D.III.M.EKON.3/04/2026.

8. Rapat Pembahasan Perkembangan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/21/D.III.M.EKON.3/05/2026.
9. Rapat Koordinasi Pengeluaran Barang dari KB ke TLDDP sesuai surat undangan Nomor PED.02.03/23/D.III.M.EKON.3/06/2026.
10. Kegiatan *Sharing Session* "Peningkatan Pembiayaan Ekspor untuk Industri Padat Karta" sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/24/D.III.M.EKON.3/06/2026.
11. Pelaksanaan Southeast Asian Forum on Export Control (SEAFEC) tanggal 17 September 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target sebagai berikut:

1. Perubahan tarif, kebijakan perdagangan dan fragmentasi pasar meningkatkan ketidakpastian bagi eksportir, terutama dalam menentukan pasar tujuan, harga dan investasi.
2. Pertumbuhan perlu didorong oleh produk hilirisasi dan manufaktur bernilai tambah, bukan hanya peningkatan volume/harga komoditas.
3. Nilai ekspor jasa masih memerlukan peningkatan karena potensi ekspor jasa belum mampu mengimbangi kebutuhan jasa dari luar negeri.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diversifikasi pasar ekspor, percepatan CEPA/FTA, penguatan market intelligence dan optimalisasi akses pasar melalui perjanjian perdagangan.
2. Percepatan hilirisasi, pengembangan industri pengolahan berorientasi ekspor, peningkatan *local value added*, dan integrasi UMKM ke *global value chains*.
3. Perlu dilakukan pengembangan *talent/export-ready skills*, sertifikasi internasional, promosi jasa Indonesia sehingga

dapat meningkatkan ekspor jasa.

### 1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB

#### Latar Belakang

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah seperti halnya dalam mendorong konsumsi rumah tangga, menjaga kelancaran distribusi barang, serta mendukung stabilitas harga. Pada tahun 2025 TW IV, perdagangan besar dan eceran secara nasional berkontribusi 13,22%.

Pengukuran kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB (\%)} = \frac{\text{PDB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran}}{\text{PDB Nasional}} \times 100\%$$

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah.

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB Tahun 2026 adalah sebesar 13,07%. Penetapan target ini dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya di mana target diharapkan dapat dipertahankan dan stabil sampai akhir tahun. Capaian IKU 1.3 sampai dengan Triwulan III 2026 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                   | Satuan     | Target TW III | Realisasi TW III | % Kinerja |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| IKU 1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap | Persentase | 13,07%        | 13,02%*          | 99,62%    |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| PDB |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

Keterangan: \*) Angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada triwulan II tahun 2026

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Triwulan III Tahun 2026 belum diketahui karena jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir awal November 2026. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB Triwulan II Tahun 2025 yang telah dirilis pada Agustus 2026. Merujuk pada realisasi Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 13,28% dan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 13,02%. Dari kedua proyeksi tersebut, angka Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan III tahun 2026 diperkirakan minimal dapat mencapai 13,02%, sehingga kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 99,62%.

Data yang terdapat pada BPS masih merupakan gabungan antara Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi, Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor (Kategori G). Sebagai upaya menjaga validitas dan kredibilitas data, telah dikirimkan permintaan pemisahan data PDB Kategori G1 dan G2 ke BPS, namun data tersebut belum didapat sampai laporan ini disusun.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB</b> |                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan I</b>                                                |                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>No</b>                                                        | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                            | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                | Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB | Terlaksana    | Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha. |
| <b>Triwulan II</b>                                               |                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>No</b>                                                        | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                            | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                    |

| 1                   | Koordinasi kebijakan penyelesaian kendala dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB | Terlaksana | Koordinasi kebijakan penyelesaian kendala dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha.             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan III</b> |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| No                  | Rencana Aksi                                                                                                           | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                               |
| 1                   | Koordinasi evaluasi penyelesaian kendala dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB  | Terlaksana | Koordinasi evaluasi penyelesaian kendala dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB dilaksanakan dengan melaksanakan diskusi, serta monitoring evaluasi dengan K/L serta pelaku usaha. |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut sebagai berikut:

1. Adanya risiko gangguan pasokan dan distribusi akibat cuaca ekstrem/El Niño .
2. Normalisasi permintaan setelah HBKN dan libur sekolah.
3. Kenaikan indeks harga perdagangan besar, terutama pada listrik, gas, air, serta bijih besi/mineral yang dapat meningkatkan biaya pengadaan pedagang dan modal kerja.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada

selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penguatan *early warning system*, pengamanan stok, kerja sama antar daerah, pengelolaan distribusi antardaerah, serta koordinasi TPIP–TPID.
2. Menjaga daya beli melalui stimulus yang tepat sasaran, bantuan sosial, pengendalian harga, serta mendorong kegiatan perdagangan dan konsumsi produktif.
3. Memperkuat kerja sama antar daerah untuk melakukan preventif pengendalian harga, serta efisiensi logistik dan distribusi.

#### 1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi *Gig Economy*

#### Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Inisiasi *Gig Economy* digunakan untuk mengukur pelaksanaan inisiasi pengembangan *gig economy* melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi di beberapa lokasi *pilot project*. IKU ini merupakan IKU baru direktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, maka perlu adanya pematangan konsep program *gig economy* sebelum pelatihan dilaksanakan untuk keberlanjutan program yang lebih baik. Mitra penyedia pelatihan melibatkan perusahaan teknologi (*tech company*), institusi akademik, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam pengembangan talenta ekonomi digital.

Target lokasi *Pilot Project* tahun 2026 terdiri dari 14 kota, yaitu Makassar, Yogyakarta, Bandung, Medan, Banjarmasin, Lombok, Mataram, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Manado, Jayapura, dan Tangerang. Kota-kota tersebut dapat menyesuaikan, namun merupakan daerah yang representatif untuk perkembangan *gig economy* di Indonesia, didorong oleh infrastruktur digital tinggi, populasi Gen Z/milenial, serta tingginya pekerja kreatif dan *freelancer*.

Capaian IKU ini mencerminkan persentase penyelesaian inisiasi *gig economy* minimal di 9 kota *pilot project*. Program ini diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia dalam membangun tenaga kerja *gig economy* yang kompeten, adaptif terhadap transformasi digital, serta siap berpartisipasi secara produktif dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Hal ini diharapkan dapat mendukung penguatan kualitas SDM sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyelesaian Inisiasi } \textit{Gig Economy} = (\text{Realisasi daerah inisiasi } \textit{Gig Economy} / \text{Target daerah inisiasi } \textit{Gig Economy}) * 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.4 Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy Tahun 2026 adalah sebesar 60%. Capaian IKU 1.4 sampai dengan Triwulan III 2026 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                               | Satuan     | Target TW. III | Realisasi TW. III | % Kinerja |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| IKU 1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy | Persentase | 60%*           | 21,43%            | 35,72%    |

\*Angka merupakan target tahunan

### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| 1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy |                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwulan I                                        |                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No                                                | Rencana Aksi                                                                          | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                 | Koordinasi persiapan peluncuran Program Pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project | Terlaksana | Koordinasi persiapan peluncuran Program Pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project terlaksana sesuai undangan nomor KWU.06.01/5/D.III.M. EKON.1/1/2026 tanggal 5 Januari 2026; PED.04.02/9/D.III.M. EKON.1/01/2026 tanggal 6 Januari 2026; PED.04.02/20/D.III.M. EKON.1/01/2026 tanggal 9 Januari 2026; PED.04.02/34/D.III.M. EKON.1/01/2026 tanggal 19 Januari 2026; PED.04/45/D.III.M.E KON.1/01/2026 tanggal 23 Januari 2026; PED.04.02/58/D.III.M. EKON.1/01/2026 |

|                     |                                                                                                         |            | tanggal 26 Januari 2026;<br>PED.04/78/D.III.M.E<br>KON.1/02/2026<br>tanggal 3 Februari 2026;<br>PED.04.02/100/D.III.<br>M.EKON.1/02/2026<br>tanggal 18 Februari 2026.                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                   | Pelaksanaan launching dan pelatihan program Gen Z: Gig Economy & AI Competition di lokasi pilot project | Terlaksana | Pelaksanaan launching dan pelatihan program Gen Z: Gig Economy & AI Competition di lokasi pilot project telah dilakukan di Jawa Barat (Kota Bandung), D.I.Yogyakarta, dan DKI Jakarta |
| <b>Triwulan II</b>  |                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                       |
| No                  | Rencana Aksi                                                                                            | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                            |
| 1                   | Pelaksanaan program pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project                                       | Terlaksana | Pelaksanaan program pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project telah dilakukan di Jawa Barat (Kota Bandung), D.I.Yogyakarta, dan DKI Jakarta                                       |
| <b>Triwulan III</b> |                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                       |
| No                  | Rencana Aksi                                                                                            | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                            |
| 1                   | Monitoring program pelatihan Gig Economy di Lokasi pilot project                                        | Terlaksana | Monitoring program pelatihan dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali di Jakarta Creative Hub (JCH).                                                                         |

Realisasi pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Sebagai cascading dari IKU ini, pada tingkat eselon II juga telah dilaksanakan pelatihan secara rutin setiap bulan bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta di Jakarta Creative Hub.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Gig Economy mampu meningkatkan kapasitas talenta digital melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis industri yang melibatkan perguruan tinggi, SMK, serta Jakarta Creative Hub sebagai lokasi pilot project. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan efektivitas model kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia digital yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Realisasi pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif dengan Google Indonesia, perguruan tinggi, sekolah vokasi, pemerintah daerah, serta berbagai mitra pelaksana sehingga proses rekrutmen peserta, pelaksanaan pelatihan, monitoring, hingga penetapan penerima beasiswa dapat terlaksana secara efektif. Ke depan, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital akan terus memperluas pelaksanaan program Gig Economy melalui penyelenggaraan batch berikutnya dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan, tingkat penyelesaian peserta, serta relevansi materi pelatihan terhadap kebutuhan industri digital.

Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan inisiasi belum dapat dilaksanakan di semua kota target. Sampai dengan triwulan III tahun 2026, pelaksanaan inisiasi baru dilaksanakan di 3 (tiga) kota dari target 9 (sembilan) kota, yaitu di Jawa Barat (Kota Bandung), D.I.Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Atas hal tersebut, perlu penyesuaian kembali target dan skema inisiasi melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, K/L dan mitra usaha (khusus di daerah masing-masing). Sebagai langkah lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital cq. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital secara rutin melaksanakan pelatihan di Jakarta Creative Hub bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat mekanisme monitoring dan pendampingan peserta secara berkala bersama institusi mitra guna meningkatkan tingkat penyelesaian pelatihan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan mitra pelaksana, termasuk Google Indonesia, perguruan tinggi, SMK, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan *batch* berikutnya agar proses pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, dan pelaporan dapat berjalan lebih efektif;
3. Melakukan evaluasi terhadap capaian setiap institusi mitra sebagai dasar penyempurnaan mekanisme rekrutmen peserta, pendampingan, serta penentuan kuota pada pelaksanaan Program Gig Economy berikutnya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut sebagai berikut:

1. Tingkat komitmen dan konsistensi peserta dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan masih bervariasi di setiap institusi mitra, sehingga tingkat penyelesaian antar peserta belum merata. Berdasarkan hasil monitoring, masih terdapat beberapa institusi yang memiliki tingkat penyelesaian relatif lebih rendah dibandingkan institusi lainnya;
2. Pelaksanaan pelatihan yang melibatkan berbagai perguruan tinggi, SMK, pemerintah daerah, dan mitra industri memerlukan koordinasi yang intensif, khususnya dalam proses pendaftaran peserta, pemantauan progres pembelajaran, serta konsolidasi data penyelesaian pelatihan dan sertifikasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan penegasan komitmen kepada peserta pada saat pendaftaran program.
2. Diperlukan suatu *databased* agar peserta dapat dimonitoring secara individu.

#### **1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri**

##### **Latar Belakang**

Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri merupakan IKU baru merupakan IKU baru direktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berkontribusi terhadap penguatan nilai perdagangan dalam negeri melalui optimalisasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar domestik, penguatan distribusi barang, serta stimulasi konsumsi produk dalam negeri.

Adapun program belanja nasional yang direncanakan untuk terselenggara pada tahun 2026 berjumlah 5 kegiatan yaitu:

1. BINA Lebaran
2. Friday Mubarak
3. BINA Indonesia Great Sale
4. Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS)
5. EPIC Sale

Kegiatan akan diselenggarakan oleh asosiasi terkait yaitu HIPINDO (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), dan idEA (Indonesia, *E-Commerce Association*) dengan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Capaian efektivitas menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas sektor, kesiapan pelaku usaha, serta respons positif masyarakat terhadap kampanye belanja nasional. Dengan demikian, indikator ini berperan penting sebagai dasar

perumusan kebijakan lanjutan guna memperkuat ekosistem perdagangan dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri =  
 (Realisasi nilai transaksi program belanja nasional/ Target  
 nilai transaksi program belanja nasional yang direncanakan )  
 \* 100%

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.5 Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Capaian IKU 1.5 sampai dengan Triwulan III 2026 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                      | Satuan     | Target TW III | Realisasi TW III | % Kinerja |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| IKU 1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri | Persentase | 100%*         | 96,73%           | 96,73%    |

\*Angka merupakan target tahunan

### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| 1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri |                                                                    |            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwulan I                                               |                                                                    |            |                                                                                                                                                      |
| No                                                       | Rencana Aksi                                                       | Status     | Keterangan                                                                                                                                           |
| 1                                                        | Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Negara triwulan I | Terlaksana | Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Negara triwulan I telah dilaksanakan sesuai dengan surat nomor PED.01.01/01/D.III.M. EKON.2/01/2026 |
| Triwulan II                                              |                                                                    |            |                                                                                                                                                      |
| No                                                       | Rencana Aksi                                                       | Status     | Keterangan                                                                                                                                           |
| 1                                                        | Koordinasi persiapan pelaksanaan                                   | Terlaksana | Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri                                                                                        |

|                     | Program Belanja Dalam Negeri Triwulan II                                   |            | Triwulan II telah dilaksanakan sesuai surat nomor PED.01.01/14/D.III.M. EKON.2/05/2026 dan PED.01.01/17/D.III.M. EKON.2/06/2026.                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                   | Evaluasi pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri semester I               | Terlaksana | Evaluasi pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri semester I telah dilaksanakan sesuai surat nomor PED.01.01/07/D.III.M. EKON.2/03/2026.                                                                             |
| <b>Triwulan III</b> |                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                      |
| No                  | Rencana Aksi                                                               | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                           |
| 1                   | Koordinasi persiapan pelaksanaan program Belanja Dalam Negeri triwulan III | Terlaksana | Koordinasi persiapan pelaksanaan program Belanja Dalam Negeri triwulan III dilaksanakan untuk acara Retail Summit & Expo (IRSE), Hari Retail Modern Indonesia (HARMONI), dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) August. |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja salah satunya adalah pelaksanaan *Press Conference* Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE), Hari Retail Modern Indonesia (HARMONI), dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) August berdasarkan surat Nomor PED.01.01/20/D.III.M.EKON/08/2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih belum optimalnya promosi program belanja nasional.
2. Program Belanja Nasional di Triwulan III merupakan periode *low season* karena tidak banyak agenda besar (libur nasional/periode libur sekolah/HBKN) pada waktu ini.

Berdasarkan kendala-kendala juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi promosi program belanja nasional di kanal resmi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan gerakan pangan murah yang merupakan kebutuhan pokok juga dapat dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat.

## 2

### Sasaran Program: Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- 2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB
- 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

#### 2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB Latar Belakang

Biaya transportasi adalah biaya yang mencakup biaya transportasi primer dan sekunder menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi primer meliputi biaya perpindahan pengisian dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain, dan pengangkutan inbound atas perpindahan barang jadi yang dibeli ke pabrik atau pusat distribusi. Biaya transportasi sekunder termasuk pembayaran kepada pengangkut, tunjangan penjemputan, peralatan truk atau kereta api dan biaya operasional.

Biaya transportasi terdiri dari:

- Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel
- Biaya Jasa Penunjang Angkutan
- Biaya Jasa Angkutan Laut
- Biaya Jasa Angkutan Udara
- Biaya Jasa Pos dan Kurir
- Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- Jasa Angkutan Rel

Pengukuran biaya transportasi logistik terhadap PDB bertujuan memberikan gambaran kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik. Formula pengukuran adalah sebagai berikut:

#### Biaya Transportasi Logistik Terhadap PDB

$$= (\text{Nilai biaya transportasi logistik} / \text{nilai PDB}) * 100\%$$

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 8,09%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 2.1 sampai dengan Triwulan III 2026 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                              | Satuan     | Target*<br>TW.III | Realisasi<br>TW.III | % Kinerja |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| IKU 2.1.<br>Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB | Persentase | 8,09%*            | 10,45%**            | 77,42%    |

*Keterangan:*

*\*) Target merupakan nilai maksimal*

*\*\*\*) Angka realisasi merupakan proyeksi*

Target biaya transportasi logistik terhadap PDB tahun 2026 adalah 8,09% yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin rendah biaya logistik berarti semakin baik kinerjanya.

Sampai dengan laporan ini disusun, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB Triwulan III tahun 2026 belum diketahui mengingat rilis data PDB Nasional Lapangan Usaha Triwulan III belum terbit dan diperkirakan akan rilis pada awal November 2026. Proyeksi Triwulan III tahun 2026 menggunakan realisasi triwulan II tahun 2026.

Biaya transportasi logistik/Biaya Logistik Nasional (BLN) terdiri dari biaya transportasi logistik darat dan laut yang perhitungannya dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan sudah diumumkan secara tertutup pada triwulan IV 2025 untuk BLN 2022 dengan menggunakan basis IO 2016, sedangkan untuk BLN 2023-2024 menggunakan basis IO 2020.

Realisasi Triwulan III didorong oleh penyelesaian RPerpres Penguatan Logistik Nasional yang berisikan 3 (tiga) strategi yang menyasar pada peningkatan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan logistik. Oleh karena itu, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB pada Triwulan III tahun 2026 diperkirakan minimal dapat mencapai 10,45%, sehingga kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 77,42%.

Pada tahun 2026, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Penguatan Logistik Nasional melalui percepatan penetapan dan pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan pilar strategi sebagai berikut:

1. penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang Logistik;
2. penguatan integrasi dan digitalisasi Layanan Logistik; dan
3. peningkatan daya saing sumber daya manusia dan Penyedia Jasa Logistik.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional diarahkan untuk dapat menurunkan persentase biaya Logistik Nasional terhadap Produk Domestik Bruto. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q Asdep Pengembangan Logistik Nasional selaku pemrakarsa, terus melakukan langkah-langkah koordinatif dalam rangka memenuhi fokus yang telah ditetapkan untuk tahun 2026, antara lain melalui penyelenggaraan

rapat koordinasi tingkat eselon 1 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.

### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| 2.1 <i>Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB</i> |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwulan I                                          |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No                                                  | Rencana Aksi                                                                                                                                                                               | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                   | Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> | Terlaksana | Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> telah dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan Tindak Lanjut <i>Domestic Working Group</i> untuk <i>ASEAN Common Qualification</i> pada Profesi Warehouse Operator dan Freight Forwarder pada tanggal 14 Januari 2026. |
| Triwulan II                                         |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No                                                  | Rencana Aksi                                                                                                                                                                               | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                   | Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i>  | Terlaksana | Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> telah dilaksanakan pada tanggal 9 dan 13 April 2026.                                                                                                                                                                 |
| Triwulan III                                        |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No                                                  | Rencana Aksi                                                                                                                                                                               | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                   | Koordinasi dan monitoring digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i>                         | Terlaksana | Koordinasi dan monitoring digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> dilaksanakan melalui sosialisasi pengundangan Perpres No. 41 Tahun 2026 tanggal 16 Juli 2026.                                                                                                                                               |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya adalah:

1. Rapat Pembahasan Penyusunan Kualifikasi Profesi *Warehouse Operator* dan *Freight Forwarder* Nasional tanggal 4 dan 10 Februari 2026.
2. *Capacity Building Workshop for the AKFTA Common Occupational Standards*

*Frameworks for Freight Forwarders and Warehouse Controllers tanggal 6 maret 2026.*

3. Rapat Pembahasan *Pending Matters* Rencana Aksi RPerpres Penguatan Logistik Nasional tanggal 25 Februari, 5 Maret, 19 Maret 2026.
4. FGD Pembahasan Strategi Meningkatkan Pemanfaatan Moda Pengangkutan Barang Berbasis Rel tanggal 16 April 2026.
5. *Upgrading* Kualifikasi SDM Sektor Pergudangan Logistik tanggal 22 Juni 2026
6. Rapat Koordinasi Program UMKM Logistik tanggal 4 dan 20 Mei 2026.
7. Rapat Dialog Penguatan Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Logistik di Jepang tanggal 27 April 2026.
8. Diskusi kajian dengan Asian Development Bank (ADB) tanggal 8 Juli 2026.
9. Rapat Koordinasi Pembiayaan UMKM Truk pada Program KIPK tanggal 29 September 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut sebagai berikut:

1. Keterlambatan rilis data perhitungan Biaya Logistik Nasional (BLN) oleh Kementerian PPN/Bappenas sehingga menghambat proses analisis dan penyusunan rekomendasi penurunan BLN.
2. Belum semua layanan logistik berbasis digitalisasi dan juga belum terintegrasi sehingga menimbulkan beban waktu dan biaya bagi pengguna jasa.
3. Dalam penyelenggaraan angkutan barang, masih terdapat armada truk yang berusia relatif tua dan belum dilakukan peremajaan secara optimal sehingga menyebabkan peningkatan risiko gangguan kendaraan, biaya pemeliharaan, serta konsumsi bahan bakar.
4. Keterbatasan ketersediaan armada kapal nasional dan belum optimalnya pengawasan serta penegakan kebijakan penggunaan angkutan laut nasional masih menjadi kendala dalam mengurangi ketergantungan terhadap pelayaran asing.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

1. Penyediaan data BLN untuk kebutuhan analisis dan penyusunan rekomendasi dilakukan dengan proyeksi internal menggunakan data PDB harga berlaku triwulanan yang dirilis oleh BPS.
2. Melakukan percepatan adopsi digitalisasi layanan logistik dan juga percepatan integrasi layanan logistik baik B to G maupun B to B.
3. Percepatan program peremajaan armada secara bertahap serta optimalisasi dukungan pembiayaan melalui skema KIPK guna mendorong pelaku usaha melakukan penggantian armada yang sudah berusia tua.
4. Mendorong peningkatan penggunaan armada kapal nasional secara bertahap melalui penguatan pengawasan dan penegakan kebijakan angkutan laut nasional.

## 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

### Latar Belakang

Waktu perputaran (*Turn Around Time/TAT*) di pelabuhan yang difokuskan untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.

Pelabuhan yang dijadikan sampel perhitungan terdiri dari Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya). Kedua pelabuhan tersebut dipilih karena merupakan pelabuhan tersibuk dan terbesar yang menjadi barometer perekonomian Indonesia.

Pengukuran rata-rata waktu perputaran di pelabuhan bertujuan memberikan gambaran kinerja pelabuhan dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum. Formula pengukuran adalah sebagai berikut:

#### Waktu Perputaran di Pelabuhan (TT)

= (Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual – Waktu Tiba Aktual) : Jumlah Kapal

#### Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok

= □ - □ □ □ h □ : 12

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan Tahun 2026 adalah sebesar 1,6 Hari. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029.

Hingga Triwulan III tahun 2026, Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan yang telah terealisasi sebesar 1,42 Hari atau mencapai 110% dari target tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                          | Satuan     | Target TW III | Realisasi TW III | % Kinerja |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| IKU 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan | Persentase | 1,6 Hari*     | 1,42 Hari        | 110%      |

\*) Target merupakan nilai maksimal (satuan hari = 24 jam)

Target rata-rata waktu perputaran di pelabuhan tahun 2026 adalah 1,6 hari yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin cepat waktu perputaran berarti semakin baik kinerjanya. Realisasi triwulan III tahun 2026 adalah 1,42 hari dari target 1,6 hari atau berhasil mencapai kinerja 110%. Nilai ini diperoleh berdasarkan realisasi Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok

untuk Kegiatan Ekspor-Impor sebesar 1,64 hari dan di Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 1,19 hari.

Pada tahun 2026, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Peningkatan Kinerja Pelabuhan dan Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Kebijakan Pembangunan *Dashboard* Kinerja Logistik Nasional, serta Finalisasi RPerpres Penguatan Logistik Nasional.

Kemenko Perekonomian menginisiasi pembangunan *Dashboard* Kinerja Logistik Nasional dengan asistensi dari Bank Dunia guna memantau kinerja logistik domestik maupun internasional dari sisi efisiensi melalui dimensi waktu yang dikembangkan mengikuti kaidah *best practice international* (pendekatan *Supply Chain Tracking Data/Logistic Performance Index*) serta untuk mendukung pembuatan kebijakan di bidang logistik dalam rangka menurunkan biaya logistik nasional terhadap PDB.

Indikator kinerja logistik internasional yang akan mengikuti indikator dalam perhitungan *Logistics Performance Index* (LPI) oleh Bank Dunia, meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time at Port*; (ii) *Container indicator: Container Dwell Time Import & Export*; (iii) *Container Indicator: Consolidated Dwell Time Import & Export*; (v) *Postal indicator: Postal Delivery Time Import*; (vi) *Airport indicator: Aviation Dwell Time Import*;

Indikator kinerja logistik domestik meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time Domestic*; (ii) *Inter-Island indicator: Container Dwell Time Outbound & Inbound*.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan</b> |                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan I</b>                                   |                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>No</b>                                           | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                                    | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                   | Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan produktivitas alat bongkar muat di terminal peti kemas pelabuhan         | Terlaksana    | Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan produktivitas alat bongkar muat di terminal peti kemas pelabuhan telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Penyepakatan Definisi dan Ruang Lingkup Rata-Rata Waktu Perputaran Kapal di Pelabuhan ( <i>Ship Turn Around Time at Port/TAT</i> ) pada tanggal 4 Maret 2026. |
| <b>Triwulan II</b>                                  |                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>No</b>                                           | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                                    | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                   | Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan dan penyusunan strategi peningkatan kinerja bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan | Terlaksana    | Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan dan penyusunan strategi peningkatan kinerja bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Definisi dan Ruang Lingkup Rata-Rata Waktu Perputaran Kapal di                                                                             |

|              |                                                                                                                                                                             |            | Pelabuhan ( <i>Ship Turn Around Time at port/STT</i> ) pada tanggal 27 April 2026.                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwulan III |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                        |
| No           | Rencana Aksi                                                                                                                                                                | Status     | Keterangan                                                                                                                                             |
| 1            | Koordinasi, sosialisasi, dan monitoring kepada seluruh pemangku kepentingan terkait strategi peningkatan kinerja kegiatan bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan | Terlaksana | Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke Pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Belawan pada tanggal 10 September 2026 dan 16 September 2026. |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya adalah:

1. Rapat persiapan *Focus Group Discussion Road to ALFI CONFEX* tanggal 12 Juni 2026.
2. Audiensi dengan Putral UGM tanggal 23 Juni 2026.
3. Menghadiri Launching Sistem Penegakan Hukum Melalui Alat Bukti Rekaman Elektronik Pelanggaran Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ETLE HUB) tanggal 10 Agustus 2026 di Kemenhub.
4. Menghadiri *Coffe Morning: Road to ALFI CONVEX 2026* tanggal 2 September 2026 di Menara KADIN Jaksel.
5. Menghadiri *Afternoon Meeting ALFI CONVEX* tanggal 7 Oktober 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

#### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target yaitu disrupsi pelayaran yang mengakibatkan perubahan jadwal operasional berdampak pada keterlambatan kedatangan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok dan berpotensi mempengaruhi kelancaran operasional pelayanan kepelabuhan.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yaitu melakukan koordinais dengan para pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi penyampalan informasi terkait penyiapan pelabuhan dalam melakukan pelayanan bongkar muat, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 3.1. Indeks Literasi Keuangan Latar Belakang

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

Penggunaan akun/layanan keuangan formal adalah penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, seperti jumlah rekening tabungan dan kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada penerbit uang elektronik, persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal. Literasi keuangan yang memadai mendorong meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, serta perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk mengukur indeks literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, tingkat literasi keuangan nasional pada triwulan IV tahun 2025 menunjukkan 66,64%.

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2026 adalah sebesar 60,27. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun realisasi capaian Triwulan III 2026 pengukuran capaian Indeks literasi keuangan akan diperoleh melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). SNLIK akan diumumkan pada Semester II Tahun 2026, sehingga hasil survei SNLIK baru dapat diketahui pada akhir tahun 2026, maka dari itu ketercapaian target pada Triwulan III belum dapat diketahui dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama           | Satuan     | Target TW III | Realisasi TW III | % Kinerja |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| IKU 3.1. Indeks Literasi Keuangan | Persentase | 60,27         | 69,57*           | 115,43%   |

\*) angka realisasi tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK Tahun 2026).

Pada Triwulan III tahun 2026 belum dapat diketahui berapa realisasinya karena indeks literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II Tahun 2026 sehingga hasil survei baru dapat diketahui pada akhir tahun.

Realisasi indeks literasi keuangan tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri, dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>3.1 Indeks Literasi Keuangan</b> |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan I</b>                   |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>No</b>                           | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                                   | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                   | Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan indeks literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas | Terlaksana    | Koordinasi Awal Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi Segmen Prioritas:<br>a. Rapat Persiapan Penyusunan Bahan Laporan SNKI Tahun 2025 pada tanggal 6 Januari 2026 (Pokja II, Sekretariat DNKI), 7 Januari 2026 (Pokja I dan III), 9 Januari 2026 (Pokja VI dan VII), 13 Januari 2026 (Pokja IV dan V).<br>b. Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut FGD Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Peningkatan Ekonomi Rakyat (PINTAR) dengan OJK pada tanggal 5 Februari 2026.<br>c. Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan "Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan" pada tanggal 2 Maret 2026. |
| 2                                   | Peluncuran AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTREA untuk perkuat literasi dan inklusi keuangan                                       | Terlaksana    | Peluncuran AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTREA untuk perkuat literasi dan inklusi keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              |                                                                                                                                      |            | telah dilaksanakan pada 6 Maret 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwulan II  |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No           | Rencana Aksi                                                                                                                         | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1            | Koordinasi dan monitoring pelaksanaan peningkatan literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas pada Semester 1   | Terlaksana | <p>1. Koordinasi Awal Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi Segmen Prioritas:</p> <p>a. Rapat Program kerjasama dengan BMGF terkait Pemberdayaan UMKM pada tanggal 28 April 2026.</p> <p>b. FGD Konsultasi Stakeholder Penguatan Program Inklusi Keuangan menuju Kesejahteraan Keuangan pada tanggal 18 Mei 2026.</p> <p>2. Sosialisasi dan Edukasi terkait Literasi Keuangan Konvensional:</p> <p>a. Rapat Persiapan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Berbasis Integrated Farming Komoditas Nilam pada tanggal 15-17 April 2026.</p> <p>b. Strive Learning Network: Launching dan Diseminasi Dokumen Pembelajaran dari Program Mastercard Strive Indonesia pada tanggal 4 Mei 2026.</p> |
| 2            | Evaluasi pilot project PINTAR di Kabupaten Kuningan                                                                                  | Terlaksana | Tindak Lanjut Pilot Project Program PINTAR dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Triwulan III |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No           | Rencana Aksi                                                                                                                         | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1            | Tindak lanjut koordinasi dan monitoring peningkatan literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas pada semester 2 |            | <p>1. Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional:</p> <p>a. Rapat tindak lanjut arahan presiden melalui menko Terkait Program Pembukaan Rekening untuk Masyarakat pada tanggal 16 September 2026.</p> <p>b. Focus Group Discussion (FGD) "Peluang Kolaborasi Literasi Keuangan dan Ekonomi Hijau Ramah Iklim" di Banda Aceh pada tanggal 31 Agustus 2026.</p> <p>2. Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah:</p> <p>a. Breakfast Meeting untuk membahas terkait halal, bersama pejabat eselon 1 Kemenperin dan Kemendag di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2026.</p> <p>b. Kunjungan dalam</p>                                  |

|   |                                                         |  |                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                         |  | rangka monitoring perkembangan sertifikasi halal dan pemberdayaan ekonomi UKM Dekenat Bekasi pada tanggal 12 Agustus 2026.                                             |
| 2 | Sosialisasi dan replikasi program PINTAR di daerah lain |  | 1. Rapat Koordinasi Teknis Program PINTAR pada tanggal 5 Agustus 2026.<br>2. Monitoring, Evaluasi, dan Kunjungan Lapangan Program PINTAR pada tanggal 19 Agustus 2026. |
| 3 | Pelaksanaan bulan literasi keuangan                     |  | Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan SNKI Semester I Tahun 2026 pada tanggal 17 September 2026.                                                                         |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi rutin bersama Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Komnas Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Adapun upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Field Visit to the ILO Supported Seaweed Ecosystem Site Waingapu and Kupang pada tanggal 8-10 Juli 2026.
2. Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Tahun 2026 pada tanggal 5 Agustus 2026
3. Field Visit to the ILO-Supported Patchouli Ecosystem Site pada tanggal 3 September 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.518.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, meski target yang ditetapkan tercapai, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan dimana banyak masyarakat sudah memiliki produk keuangan misalnya rekening bank, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengelola produk tersebut secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada sektor non-bank. Literasi masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga masyarakat gagal memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan pengembangan aset (pasar modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah tangga menjadi rapuh. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara inklusi keuangan di perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses. Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun

2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif program yang secara spesifik menasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal, serta penguatan DNKI menjadi DNKK .

**4**

**Sasaran Program: Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital**

##### **Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap dinamika perekonomian global, khususnya pada sektor perniagaan dan ekonomi digital, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan melalui proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terintegrasi. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputy Bidang koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

- (1) Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
- (2) Pengembangan Ekspor Nasional
- (3) Penguatan Ekosistem Logistik Nasional
- (4) Pengembangan Ekonomi Digital
- (5) Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

##### **Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

##### **Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

##### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

#### Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

##### Indeks efektivitas SKP

$$= 5 \sqrt{\frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5}{5}}$$

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke **skala**, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3), rentang nilai 81 - 90
- Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 3 dari 4 (baik) yang diperoleh dari data setiap Keasdepan dan dihitung berdasar rumus.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi **sebesar 1 dengan capaian penilaian 63,84% atau 100% dari target Triwulan III atau 33,33% dari target tahun 2026** dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                   | Satuan     | Target Tahunan | Target TW III | Realisasi TW III | % Kinerja |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------|-----------|
| IKU 4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital | Persentase | 3 dari 4       | 1 dari 4      | 1*               | 100%      |

*Catatan: Nilai belum merupakan indeks akhir, capaian Penilaian Efektivitas SKP sampai triwulan III 2026 adalah 63,84%*

Penilaian Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diperoleh dari akar lima dari Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di unit Eselon II: Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. Adapun realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

| No | Unit Kerja Eselon II                                                             | Persentase Efektivitas SKP (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga | 60                             |
| 2  | Asisten Deputi Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor                    | 72,5                           |
| 3  | Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional                                    | 65                             |
| 4  | Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital                                      | 62,5                           |
| 5  | Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan                                      | 60                             |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Penilaian Efektivitas SKP sampai dengan Triwulan III</b> | <b>63,84</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

Pada Triwulan III Tahun 2026, Penilaian Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi adalah 63,84%. Hal ini dikarenakan sebagian besar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang dilaksanakan di unit Eselon III Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital masih berada pada **tahap kedua** yaitu Penyusunan Alternatif Rekomendasi.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital</b> |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan I</b>                                                                                                             |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>No</b>                                                                                                                     | <b>Rencana Aksi</b>                                                                         | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                             | Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait kegiatan peningkatan ekspor dan pengendalian impor | Terlaksana    | <p>Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait kegiatan peningkatan ekspor dan pengendalian impor dilaksanakan melalui:</p> <p>a. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Optimalisasi Peran FTA dalam Rangka Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/09/D.III.M.EKON.3/02/2026 dan PED.02.01/10/D.III.M.EKON.3/02/2026.</p> <p>b. Penyampaian Surat Surat Sesmenko Perekonomian a.n. Menko Perekonomian perihal Pertimbangan atas Pengenaan BMAD terhadap Impor Kertas Dupleks asal Korea, Malaysia, dan Taiwan sesuai surat nomor PI.02.03/13/M.EKON/02/2026.</p> <p>c. Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Upaya Penguatan Efektivitas Kebijakan <i>Trade Remedies</i> sesuai nomor undangan PED.02.03/32/D.III.M.EKON/02/2026.</p> <p>d. Penyampaian Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan RPermendag Impor sesuai nomor undangan PED.02.01/35/D.III.M.EKON/02/2026.</p> <p>e. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Kajian Arah</p> |

|                    |                                                                                                                                 |            | <p>Pengembangan Industri TPT sesuai nota dinas nomor PED.02.03/24/D.III.M.EKON/02/2026.</p> <p>f. Penyampaian Surat Sesmenko Perekonomian a.n. Menko Perekonomian perihal Pertimbangan atas Penyelidikan KADI terkait Pengenaan BMAD terhadap HRC asal Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd. sesuai surat nomor PI.02.03/22/M.EKON/02/2026.</p>                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                  | Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, iklim usaha, inovasi, dan investasi | Terlaksana | <p>Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi dilaksanakan melalui:</p> <p>a. Kegiatan Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 tanggal 3 Maret 2026.</p> <p>b. Rapat Koordinasi Persiapan Posisi Indonesia untuk pertemuan ASEAN DEFA putaran ke-16, tanggal 9 Januari 2026.</p> <p>c. Launching Program Penguatan Ekosistem Gig Economy di Bandung tanggal 30 Januari 2026.</p> |
| 3                  | Koordinasi identifikasi permasalahan terkait peningkatan literasi keuangan                                                      | Terlaksana | <p>Koordinasi identifikasi permasalahan terkait peningkatan literasi keuangan dilaksanakan melalui:</p> <p>a. Rapat Pembahasan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada tanggal 5 Januari 2026.</p> <p>b. Rapat Program Kerja Kelembagaan Kesejahteraan Keuangan Pembahasan Penguatan Program Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (Pokja 1) pada 29 Januari 2026.</p>                                                                                 |
| <b>Triwulan II</b> |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No                 | Rencana Aksi                                                                                                                    | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait peningkatan produktivitas alat bongkat muat di terminal peti kemas pelabuhan           | Terlaksana | Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait peningkatan produktivitas alat bongkat muat di terminal peti kemas pelabuhan dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Definisi dan Ruang Lingkup Rata-Rata Waktu Perputaran Kapal di Pelabuhan ( <i>Ship Turn Around Time at port/STT</i> ) pada tanggal 27 April 2026.                                                                                                                                                     |
| 2                  | Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait standarisasi dan pengawasan perdagangan                                                | Terlaksana | Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait standarisasi dan pengawasan perdagangan dilaksanakan melalui rapat koordinasi tindak lanjut aduan yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                                   |            | masuk dalam kanal <i>Debottlenecking</i> Satgas P3M-PPE (Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi).                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                   | Koordinasi dan sinkronisasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks Infrastruktur, SDM, iklim usaha, inovasi, dan investasi                                            | Terlaksana | Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan Ekosistem Semikonduktor tanggal 23 Juni 2026.                                                                                                                                                                                   |
| 4                   | Koordinasi penyusunan alternatif kebijakan peningkatan literasi keuangan                                                                                                          | Terlaksana | Koordinasi penyusunan alternatif kebijakan peningkatan literasi keuangan dilaksanakan melalui FGD Pembentukan Kelembagaan Kesejahteraan Keuangan pada tanggal 29 April 2026.                                                                                                           |
| <b>Triwulan III</b> |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No                  | Rencana Aksi                                                                                                                                                                      | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                   | Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> | Terlaksana | Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> dilaksanakan melalui sosialisasi pengundangan Perpres No. 41 Tahun 2026 tanggal 16 Juli 2026.        |
| 2                   | Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait perdagangan ritel                                                                                                                        | Terlaksana | Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait perdagangan ritel dilaksanakan melalui Rapat Evaluasi Program Belanja Nasional Triwulan 1 Tahun 2026 dan Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Nasional Triwulan III Tahun 2026 berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/07/D.III.M.EKON.2/03/2026. |
| 3                   | Koordinasi dan monitoring kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, iklim usaha, inovasi, dan investasi                                    | Terlaksana | Koordinasi dan monitoring kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, iklim usaha, inovasi, dan investasi dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan terkait Rencana Penyediaan Layanan Satelit Amazon Low Earth Orbit (LEO) di Indonesia.             |
| 4                   | Rapat koordinasi penyusunan kebijakan terkait peningkatan literasi keuangan                                                                                                       | Terlaksana | Rapat Koordinasi Penyusunan Perpres DNKK dilaksanakan pada tanggal 1, 6, 15 Juli 2026.                                                                                                                                                                                                 |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Laporan Pelaksanaan SNKI Semester I 2026 dari Pak Deputi ke Pak Menko pada tanggal 10 Agustus 2026.
2. Rapat Penyusunan Naskah Urgensi DNKK dan Lanjutan dengan PCR

ADB Manila pada tanggal 12 Agustus 2026.

3. Rapat Penyusunan Naskah Urgensi DNKK dengan ADB pada tanggal 14 September 2026.
4. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan SNKI Semester I Tahun 2026 pada tanggal 17 September 2026.
5. Rapat Teknis Penyusunan Kepmenko rekening masyarakat dengan ADB pada tanggal 18 September 2026.
6. Rapat teknis lanjutan kepmenko pembukaan rekening masyarakat pada tanggal 22 September 2026.
7. Rapat dengan adb terkait permenko pembukaan rekening masyarakat pada tanggal 29 September 2026.
8. Pelaksanaan Rapat Teknis Pembahasan Kesiapan Pengawasan dan Penerapan Wajib Sertifikat Halal berdasarkan Surat Nomor PED.01.05/19/D.III.M.EKON.2/07/2026;
9. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Perubahan Permendag Nomor 25 Tahun 2021 berdasarkan Surat Nomor PED.01.04/24/D.III.M.EKON.2/08/2026;
10. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Ekosistem Perlindungan Konsumen Nasional berdasarkan Surat Nomor PED.01.04/25/D.III.M.EKON.2/09/2026;
11. Audiensi Infrastruktur Telekomunikasi dan Persaingan Usaha di Kota Bandung, Jawa Barat.
12. Rapat Tindak Lanjut Hambatan dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi di daerah;
13. Audiensi dengan Modantara (Asosiasi Mobilitas dan Penganatarn Digital Indonesia);
14. Menghadiri Pembahasan Isu Strategis terkait Penguatan Iklim Investasi, Transformasi Digital/AI bagi UMKM, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Bekasi;
15. Rapat Teknis Penyelesaian Laporan Akuntabilitas dan Tindak Lanjut Full Power Implementasi DEFA sesuai surat Nomor KSE.04.03/95/D.III.M.EKON.5/09/2026 tanggal 7 September 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Proses penyusunan regulasi mengalami perpanjangan waktu pembahasan sebagai dampak dari perubahan arah kebijakan, dari semula RPP Komnas LIK berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 menjadi DNKK sesuai arahan Presiden.
2. Masih terdapat kesenjangan yang cukup jelas antara inklusi keuangan di perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.
3. Proses *legal scrubbing* dan penyelarasan substansi antar bab DEFA masih memerlukan koordinasi lanjutan dengan ASEAN *Secetariat* dan

negara anggota untuk memastikan konsistensi hukum serta kesesuaian dengan komitmen dalam perjanjian perdagangan internasional lainnya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka beberapa upaya tindak lanjut antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan pembahasan secara intensif dan berkala untuk mempercepat proses penyesuaian regulasi dari RPP Komnas LIK menjadi DNKK.
2. Diperlukan penguatan koordinasi lintas daerah, baik langsung melalui Pemda terkait atau melalui Kemendagri.
3. Memperkuat koordinasi dengan ASEAN *Secretariat* dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian proses legal scrubbing dan finalisasi naskah ASEAN DEFA sebagai persiapan menuju penandatanganan perjanjian pada akhir tahun 2026.

**5****Sasaran Program: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

#### Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

#### Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

$$= (\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4}) / 5$$

Catatan:

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik). Adapun target Triwulan III 2026 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik).

Pada Triwulan III tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diproyeksikan dapat mencapai sebesar 3,43 atau mencapai 110% dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target TW III | Realisasi TW III | % Kinerja |
|-------------------------|--------|---------------|------------------|-----------|
|-------------------------|--------|---------------|------------------|-----------|

|                                                                                                                              |        |                     |                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|------|
| IKU 5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital | Indeks | 3 dari 4*<br>(baik) | 3,43**<br>(baik) | 110% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|------|

\*) Nilai merupakan target triwulan IV 2026 karena survei dilaksanakan semesteran

\*\*) Nilai triwulan III merupakan proyeksi capaian

Proyeksi Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di unit: Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. Adapun Indeks Kepuasan Layanan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

| No        | Unit Kerja Eselon 2                                                              | Indeks Kepuasan Semester I |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1         | Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga | 3,35 (Puas)                |
| 2         | Asisten Deputi Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor                    | 3 (Puas)                   |
| 3         | Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional                                    | 3,29 (Puas)                |
| 4         | Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital                                      | 3,74 (Sangat Puas)         |
| 5         | Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan                                      | 3,76 (Sangat Puas)         |
| Rata-rata |                                                                                  | 3,43 (Puas)**              |

Pada Triwulan III tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital belum dilaksanakan namun berdasar proyeksi triwulan II tahun 2026 sebesar 3,43 maka pada triwulan selanjutnya dapat diperoleh nilai rata-rata Indeks minimal 3,43 (Puas) dan telah diarahkan bahwa survei akan dilaksanakan melalui *form* daring.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun

2026 sebagai berikut:

| <b>5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital</b> |                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triwulan I</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>No</b>                                                                                                              | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                                                         | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                      | Memberikan arahan tindak lanjut hasil Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II Tahun 2025 | Terlaksana    | Arahan Tindak Lanjut Hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilaksanakan melalui rapat pimpinan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.                       |
| 2                                                                                                                      | Memberikan arahan penyusunan kuesioner pengukuran Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital            | Terlaksana    | Arahan penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layannya Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada keasdepan di lingkup Deputi bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien. |
| <b>Triwulan II</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>No</b>                                                                                                              | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                                                         | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                      | Memberikan arahan pelaksanaan Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I Tahun 2026          | Terlaksana    | Arahan pelaksanaan Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I Tahun 2026 telah dilaksanakan secara daring.                                                                                                |
| <b>Triwulan III</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>No</b>                                                                                                              | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                                                         | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                      | Memberikan arahan tindak lanjut hasil Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I Tahun 2026  | Terlaksana    | Arahan Tindak Lanjut Hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilaksanakan melalui rapat pimpinan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.                       |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat dilaksanakan secara terbatas, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai pada Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu:

1. Kebutuhan koordinasi lintas K/L dan pemangku kepentingan yang meningkat karena isu yang timbul semakin banyak menyebabkan waktu respons dan penyelesaian tindak lanjut belum dapat direspons optimal, dapat mempengaruhi ekspektasi pengguna layanan.
2. Ketersediaan data dan informasi pendukung koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas layanan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya tindak lanjut :

1. Memperkuat koordinasi lintas K/L dan mengintensifkan pemantauan tindak lanjut untuk memastikan penyelesaian isu secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan integrasi dan pemutakhiran data serta informasi pendukung guna mempercepat proses analisis, koordinasi, dan penyampaian layanan kepada pengguna.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital**

Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditargetkan sebanyak 12 rencana aksi, sebagai berikut:

1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) (1 kegiatan pada triwulan IV);
2. Nilai SAKIP (2 kegiatan pada triwulan I, 1 kegiatan pada Triwulan III, 1 kegiatan pada Triwulan IIII, 2 kegiatan pada triwulan IV);
3. Tingkat Digitalisasi Arsip (1 kegiatan pada masing-masing triwulan I-IV).

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

$$\% \text{ } = \left( \frac{\text{ } : \text{ } }{\text{ } } \right) \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang  
Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 92%. Adapun  
target Triwulan III 2026 adalah sebesar 60%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 63,64% atau mencapai 106,07% dari target Triwulan III tahun 2026 atau 69,17 dari target tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                  | Satuan     | Target TW III | Realisasi TW III | % Kinerja           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------------|
| IKU 6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital | Persentase | 60%           | 63,64%           | 106,07% (Memuaskan) |

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sampai dengan triwulan III 2026 adalah sebesar 69,17% dari target 92% pada tahun 2026. Pemenuhan target menunjukkan Renaksi RB yang dilaksanakan telah memenuhi seluruh Renaksi RB yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

| Renaksi TW I                                | Renaksi TW II                         | Renaksi TW III                        | Renaksi TW IV                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan | Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja        |
| Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan       | Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi     | Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi     | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan          |
| Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi           |                                       |                                       | Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026 |
|                                             |                                       |                                       | Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi              |

#### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

| 6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital |                                             |            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwulan I                                                                                                           |                                             |            |                                                                                                                                                      |
| No                                                                                                                   | Rencana Aksi                                | Status     | Keterangan                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                    | Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja | Terlaksana | Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan melalui <i>coaching clinic</i> Lingkup Kedeputan III pembahasan penyusunan perjanjian |

|                     |                                       |            | kinerja pada tanggal 21 Januari 2026 dan penetapan dilaksanakan secara individu pada tanggal 6 Maret 2026.               |
|---------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                   | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan | Terlaksana | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan-I 2026.                                           |
| 3                   | Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI     | Terlaksana | Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan melalui Nota Dinas dan Sosialisasi SRIKANDI.                        |
| <b>Triwulan II</b>  |                                       |            |                                                                                                                          |
| No                  | Rencana Aksi                          | Status     | Keterangan                                                                                                               |
| 1                   | Penyusunan laporan kinerja triwulanan | Terlaksana | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026.                                          |
| 2                   | Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI     | Terlaksana | Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan melalui Sosialisasi SRIKANDI.                                       |
| <b>Triwulan III</b> |                                       |            |                                                                                                                          |
| No                  | Rencana Aksi                          | Status     | Keterangan                                                                                                               |
| 1                   | Penyusunan laporan kinerja triwulanan | Terlaksana | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan untuk Triwulan III 2026.                                        |
| 2                   | Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI     | Terlaksana | Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan melalui pengumuman hasil evaluasi keaktifan user pada Agustus 2026. |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rencana aksi dilaksanakan melalui media daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai pada Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi belum seluruhnya berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan karena adanya perbedaan tingkat kesiapan antar-unit kerja.
2. Pemahaman dan komitmen pelaksana terhadap substansi serta target Rencana Aksi Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya merata.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2026, maka dilakukan beberapa upaya tindak lanjut :

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres pelaksanaan Rencana Aksi serta mendorong percepatan penyelesaian kegiatan yang belum sesuai target.
2. Meningkatkan sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan kepada unit kerja untuk memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Jakarta, 9 Oktober 2026

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan  
dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon